

Judul : Sudah belasan tahun gula rafinasi bocor ke pasar, komisi VI minta impor hanya melalui BUMN
Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sudah Belasan Tahun Gula Rafinasi Bocor Ke Pasar

Komisi VI Minta Impor Hanya Melalui BUMN

POLITISI Senayan menilai, menilai banyaknya importir gula rafinasi membuat pengawasan distribusi semakin sulit. Kondisi ini membuka celah gula rafinasi industri masuk ke pasar konsumsi yang berakibat harga gula petani lokal tertekan.

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian meminta, impor gula rafinasi dibuat terpusat atau satu pintu. Tujuannya agar pengawasan lebih mudah dilakukan dan distribusinya tidak merugikan konsumen dan petani tebu.

"Sebaiknya impor gula rafinasi hanya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," usul Kawendra di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab gula petani sulit

terserap, menekan harga di tingkat petani, dan memperburuk tata niaga gula nasional.

"Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kawendra melanjutkan, jika impor gula rafinasi hanya melalui BUMN, maka distribusi bisa lebih terjaga, pengawasan menjadi lebih ketat, dan potensi gula industri rembes ke pasar konsumsi bisa ditekan. Selain itu, terapkan kebijakan biaya tambahan bagi importir gula rafinasi yang belum berkontribusi terhadap pengembangan tebu di dalam negeri.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bisa dijalankan karena Pemerintah memiliki regulator yang lengkap untuk mengatur impor dan distribusi gula rafinasi. "Mudah-mudahan persoalan



Kawendra Lukistian

gula rafinasi yang selama ini berlarut-larut, bisa selesai di era Presiden Prabowo," harap legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) ini.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengkritik kebijakan impor gula rafinasi yang tidak terkendali. Maraknya gula impor ini telah menekan keberlangsungan petani tebu lokal

dan merusak ekosistem industri gula nasional.

Dia menyayangkan persoalan gula rafinasi berlarut-larut selama belasan tahun tanpa ada penyelesaian konkret. "Bila impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Keuntungan impor memang cepat, tapi dampaknya fatal bagi industri nasional," kata politikus PKB ini.

Selain itu, ia mengkritik kebijakan tarif impor nol persen pada produk turunan seperti etanol yang membuat pabrik lokal kalah bersaing. Saat ini banyak pabrik dalam negeri tidak berjalan dan tidak bisa menggiling tebu karena kalah bersaing dengan produk impor bertarif nol persen. "Ini fakta lapangan yang harus segera dibenahi," tegasnya.

Dia berharap, Presiden Prabowo Subianto mampu mengorkestrasi sinergi lintas sektor demi mencapai swasembada gula. Begitu juga

dengan kementerian terkait tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi berani melakukan penegakan aturan di lapangan.

Sementara, Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, persoalan pergulaan nasional tidak hanya produksi, tetapi juga pengendalian distribusi. Di tengah kebutuhan nasional yang tinggi, gula dalam negeri justru menghadapi hambatan penyerapan di pasar.

"Kami menemukan adanya rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi," ujar Amran di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah pengendalian melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), disertai pengawasan distribusi yang lebih ketat. "Langkah ini diposisikan sebagai upaya menutup kebocoran gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga," tutupnya. ■ TIF